

Judul : Universitas Terapan Diusulkan Diatur dalam Revisi UU Sisdiknas
Tanggal : Selasa, 23 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Terapan Diusulkan Diatur dalam Revisi UU Sisdiknas

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan politeknik negeri dan swasta mendorong revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur adanya universitas terapan. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan universitas akademik sekaligus memperkuat riset terapan di Indonesia.

Dorongan itu disampaikan Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia (FDPNI) dan Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pellita) saat rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/9/2025).

"Kami mengusulkan transformasi politeknik menjadi universitas terapan supaya meningkatkan daya tarik politeknik dan semakin ada kesetaraan dengan PT (perguruan tinggi) akademik," kata Ketua Umum Pellita Akhwanul Akhmal dalam rapat yang membahas mengenai rancangan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) itu.

Komisi X DPR menggelar rapat untuk menjaring aspirasi terkait RUU Sisdiknas itu. Hadir pula dalam rapat itu perwakilan dari Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LKIS), Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asah Pena), serta Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPD).

Dalam rapat itu, Akhwanul mengungkapkan adanya kesenjangan besar antara perguruan tinggi akademik dan vokasi. Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Sains, dan Teknologi tahun 2023 menunjukkan 95 persen masyarakat lebih memilih perguruan tinggi akademik dan hanya 5 persen yang memilih vokasi. Dari kelompok yang memilih akademik, mayoritas masuk universitas (76 persen), diikuti sekolah tinggi (10,98 persen) dan institut (7,9 persen).

"Masyarakat lebih cenderung memilih PT akademik, utamanya universitas. Bisa di-

Ketidakseimbangan antara perguruan tinggi akademik dan vokasi menunjukkan orientasi perguruan tinggi masih terlalu teoretis.

bayangkan bagaimana beratnya politeknik, terutama politeknik swasta, yang berjumlah 227 politeknik, keberlanjutannya butuh dana dari masyarakat," ucap Akhwanul, yang juga Direktur Politeknik LP3EI Jakarta.

Menurut dia, ketidakseimbangan antara PT akademik dan vokasi menunjukkan orientasi perguruan tinggi masih terlalu teoretis. Kondisi ini membuatnya belum cukup kuat menjawab kebutuhan lapangan kerja. Padahal, PT vokasi dapat menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan spesifik serta mendukung penguatan riset dan inovasi terapan.

Ketua FDPNI Ahyar Muhammad menambahkan, perguruan tinggi politeknik perlu segera memperbesar dan melebarkan kiprahnya. Hal ini penting untuk mendukung pengembangan ilmu dan riset terapan di Indonesia.

Di luar negeri, menurut Ahyar, politeknik penyelenggara diploma 1-3 (*college*) yang membuka program sarjana terapan secara otomatis berubah menjadi universitas terapan (*polytechnic university*). Ketentuan itu membuat perkembangan politeknik menjadi lebih cepat.

Kondisi itu berbeda dengan praktik yang terjadi di Tanah Air. Politeknik negeri masih berstatus politeknik meski sudah banyak menyelenggarakan program D-4/sarjana terapan, S-2/magister terapan, bahkan S-3/doktor terapan.

Ahyar menambahkan, politeknik sering dianggap level bawah dari universitas. Akibatnya, lebih dari 60 persen lulusan dari SMK yang ber-

basis vokasi pun lebih memilih universitas akademik. Hal ini karena tidak ada aturan khusus dari SMK menuju PT vokasi sebagai kelanjutan pendidikannya.

"Ini bisa jadi alibet PT akademik yang masif dan besar sehingga lulusan SMK pun memutuskan mengambil jalur pendidikan akademik," tuturnya.

Reformasi politeknik

Melihat kondisi itu, FDPNI merasa pentingnya mereformasi pendidikan politeknik. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan politeknik menjadi universitas terapan. Namun, reformasi itu memerlukan payung hukum.

Karena itu, Ahyar mengusulkan RUU Sisdiknas mengatur dua model perguruan tinggi. Kedua model tersebut adalah universitas yang fokus pada akademik dan universitas berbasis terapan atau pendidikan vokasi guna mendukung riset terapan dan inovasi industri.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR, Andi Muawiyah Ramly, mengatakan, pihaknya menyambut baik sejumlah masukan terkait dengan RUU Sisdiknas, salah satunya tentang universitas terapan.

"Di kelompok kerja RUU Sisdiknas belum pernah dibahas soal universitas terapan. Ini masukan baru yang bisa saja dibahas," kata Andi.

Namun, anggota Komisi X DPR, Sabam Sinaga, menyampaikan, usulan untuk transformasi politeknik menjadi universitas terapan masih memerlukan kajian mendalam. "Jangan-jangan nanti seperti berubahnya IKIP menjadi universitas," ucapnya.

Ia mencontohkan transformasi universitas eks institut keguruan dan ilmu pendidikan (IKIP) yang sebelumnya fokus pada pendidikan calon guru, tetapi menghasilkan guru yang malah tidak sesuai dengan harapan. Menurut dia, pembahasan komprehensif sangat diperlukan atas usulan untuk meng-universitaskan politeknik. (ELN)